

**KETEMU KETUA DPRD MALUKU,  
DH : JALAN POROS SAPARUA DIBANGUN APBD-P 2024**



*Sumber Gambar : <https://bercahayafm.cilacapkab.go.id/>*

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Demianus Hattu, terus bergerak mendatangi pihak terkait agar jalan poros dari Pelabuhan Haria ke Saparua Kota, yang rusak berat, segera dibangun. Setelah bertemu, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, yang bersangkutan juga menemui Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun di ruang kerjanya, Rabu (5/6). Kedatangan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, meliputi Saparua, Haruku, dan Nusalaut itu agar jalan poros itu segera dibangun.

Jika Kadis PUPR Provinsi Maluku berjanji bahwa pembangunan akses jalan yang rusak parah di Saparua akan ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2025. Benhur Watubun justru menginginkan pembangunan akses jalan itu dimasukkan dalam APBD-Perubahan TA 2024. “Tentu sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Provinsi Maluku mendengar dan merespon secara langsung akses jalan yang rusak berat yang sering dikeluhkan warga Saparua,” kata Demianus Hattu kepada *Dinamikamaluku.Com*, Rabu (5/6).

Demianus Hattu mengaku, Benhur Watubun yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku itu berjanji akan menampung aspirasi warga Saparua yang disampaikan yang akan dianggarkan pada APBD-P TA 2024. “Nah, kalau Pak Kadis PUPR Provinsi Maluku berjanji bahwa pembangunan tersebut akan dianggarkan dalam APBD TA 2025, Pak Ketua DPRD Provinsi Maluku justru berjanji akan dianggarkan dalam APBD-P TA 2024,” bebarnya.

Demianus Hattu mengaku akses jalan yang mengalami kerusakan berat kurang lebih tiga kilometer tersebut, setidaknya dapat segera dibangun agar warga setempat dapat beraktifitas dengan baik dan tidak lagi mengeluh. “Nah, Pak Ketua DPRD Provinsi Maluku juga berjanji berkoordinasi dengan Kadis PUPR Provinsi Maluku agar jalan tersebut segera dibangun sehingga tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya. Apalagi, ingat dia, akses jalan itu terhubung dengan rumah sakit. Dia berharap, Saparua sebagai kecamatan tertua di Provinsi Maluku mesti diperhatikan dengan baik. “Jangan sampai kondisi jalan terus dibiarkan rusak parah,” ingatnya.

Meski begitu, Demianus Hattu yang akrab disapa DH, usai bertemu Ketua DPRD Provinsi Maluku kembali menemui Kadis PUPR Provinsi Maluku. “Pak Kadis mengatakan kalau DPRD Provinsi Maluku sudah setuju anggaran pembangunan jalan masuk APBD-P TA 2024, maka pihaknya sangat mengapresiasi dan memberikan support,” ujarnya. Untuk itu, sebagai representasi dari masyarakat di Lease memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Kadis PUPR Provinsi Maluku. Tak hanya itu, Demianus Hattu berharap sepuluh Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Dapil Malteng ikut mengawal akses jalan tersebut agar dibangun. “Apalagi Pimpinan legislatif dan instansi teknis terkait sangat mendukung,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

***<https://dinamikamaluku.com/ketemu-ketua-dprd-maluku-dh-jalan-poros-saparua-dibangun-apbd-p-2024/>, 07 Juni 2024.***

**Catatan:**

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kepala daerah kemudian menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>)